

# **DUALISME PERATURAN TENTANG PENGAWASAN TERHADAP ADVOKAT DI INDONESIA**

## **Abstrak.**

Advokat merupakan profesi mulia yang memberikan bantuan kepada pencari keadilan. Terkait pengaturannya diatur melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan Kitab Undang-undang Hukum Advokat Etika. Namun dalam kedua peraturan tersebut terdapat pasal-pasal yang tidak konsisten mengenai pengawasan advokat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara mengatasi aturan yang berbeda tentang pengawasan advokat berdasarkan UU No. 18 Tahun 2003 dan Kode Etik Kongres Ikatan Advokat Indonesia. Ini Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang mengkaji peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pengawasan advokat. Data yang diperoleh dalam penelitian ini bersumber dari literatur studi dan wawancara. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara preskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah Lex Specialist merendahkan prinsip Lex Generalis tidak dapat digunakan dalam hal ini agar yang dapat digunakan adalah asas Lex Superior derogate Legi Inferiori karena dalam asas ini hukum tertinggi dapat mengabaikan hukum yang statusnya lebih rendah sehingga kode etik sendiri tidak memiliki kedudukan dalam UU No 12 Tahun 2011, maka advokat harus lebih tunduk pada peraturan perundang-undangan yang ada.

**Kata Kunci:** *Pengaturan, Pengawasan, Advokat.*

# DUALISME PERATURAN TENTANG PENGAWASAN TERHADAP ADVOKAT DI INDONESIA

## *Abstract*

*Advocate is a noble profession that provides assistance to justice seekers. Related arrangements are regulated through Law No. 18 of 2003 and the Advocate's Code of Ethics. However, in both regulations there are inconsistent articles regarding the supervision of advocates. The purpose of this research is to find out how to resolve the different rules regarding the supervision of advocates based on Law No. 18 of 2003 and the Code of Ethics of the Association of Indonesian Advocates Congress. This research is a normative juridical research that examines regulations related to the supervision of advocates. The data obtained in this study were sourced from literature studies and interviews. The collected data was then analyzed prescriptively. The results of this study are the Lex Specialist derogate Lex Generalis principle cannot be used in this case so that what can be used is the Lex Superior derogate Legi Inferiori principle because in this principle the highest law can ignore laws with lower status so that the code of ethics itself does not have a position in Law No. 12 of 2011, then advocates should be more subject to the existing laws and regulations.*

**Keywords:** *Supervision, Advocate, Code of Ethics.*